

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP

Sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting dan erat kaitannya dengan konteks penegakan hukum pidana di suatu negara. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana dibutuhkan landasan maupun dasar yang menjadi pedoman, biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Sebelumnya, hukum acara di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa dimulai pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti *reglement op de rechterlijke organisatie* (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman; *Inladsch reglement* (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, *reglement op de strafvordering* (Stb. 1849 nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, *landgerechtsreglement* (Stb 1914

Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula ordonansi-ordonansi untuk daerah luar Jawa dan Madura yang diatur secara terpisah. Dalam perkembangannya ketentuan *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang mendapat persetujuan *Volksraad* pada tahun 1941.

HIR memuat reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum (*Openbare Ministrie*) yang tidak lagi dibawah pamongpraja, tetapi langsung berada dibawah *Officer van Justitie* dan *Procucuer General*. Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidanapun tidak berubah. *HIR* dan *reglement voor de Buitengewesten* serta *Landgerechtreghment* berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung.⁴⁴

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara

⁴⁴ Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 56

pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada *HIR* dengan perubahan dan tambahan.

Dalam rangka pembangunan di bidang sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara, maka setelah melalui beberapa upaya akhirnya pada tahun 1981 Indonesia memiliki dasar hukum acara pidana sendiri yang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP. KUHAP tersebut dianggap sebagai salah satu “karya agung” Indonesia untuk menggantikan *HIR* dan merupakan kebanggaan tersendiri karena dibuat oleh para pakar hukum Indonesia. Dengan adanya KUHAP, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.⁴⁵ Selain itu, KUHAP diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai ini yang paling penting dari setiap peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali KUHAP.

Kurang lebih 35 Tahun sudah KUHAP menjadi dasar hukum acara pidana sampai saat ini, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan modern terutama pada bidang komunikasi dan teknologi yang membawa dampak dibidang sosial, ekonomi, termasuk hukum, dimana disini kaitannya yaitu dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dunia makin terasa sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satupun negara pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain, *United Nation Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Ikut pula hadir dalam penyusunan *International Criminal*

⁴⁵ Konsideran KUHAP dengan beberapa tambahan dari penulis tanpa mengurangi atau menambah substansi

Court. Semua konvensi tersebut lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.

Dalam kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal tersebut ada negara yang membuat KUHAP baru sama sekali seperti Italia , Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria.

Pada tahun 2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru mengenai hak asasi manusia, seperti “hukum acara pidana harus *fair* dan adversarial dan menyeimbangkan hak-hak para pihak”. “Orang yang dalam situasi yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan berdasarkan aturan yang sama”. “Tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan mendapat pembelaan”. “Seseorang yang didakwa harus dibawa ke pengadilan dan mendapat putusan dalam waktu yang wajar”, dan seterusnya. Perancis pun menciptakan hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut *juge des liberte at de la detention* (hakim pemeriksa dan penahanan).

Italia membuat KUHAP baru sama sekali pada tahun 1989 yang mengeluarkan jaksa dari kekuasaan kehakiman sehingga dianut sistem adversarial murni. Penuntut umum dan terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi. Jadi benar-benar hakim berada ditengah-tengah antara

pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti lain di sidang pengadilan. Jepang telah memperkenalkan sistem baru, yaitu hakim karier dicampur dengan orang awam (*laymen*) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Dari sanalah kita (tim perancang RUU KUHAP) dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman.⁴⁶

Kecenderungan ke sistem berimbang (*adversary system*) diperkenalkan, antara lain kedua pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukum dapat menambah alat bukti baru di sidang pengadilan (seperti *saksi a' charge* dan *a de charge*). Dengan sendirinya tidak diperlukan P 21 (Pernyataan penuntut umum bahwa berkas telah lengkap) karena penuntut umum walaupun sidang telah dimulai, masih dapat meminta bantuan penyidik untuk menambah pemeriksaan seperti pengajuan saksi baru untuk melawan saksi yang diajukan penasihat hukum. Jadi, benar-benar sistem ini mengharuskan penuntut umum dan penyidik bekerjasama erat untuk suksesnya penuntutan. Atas beberapa perkembangan sistem peradilan pidana yang terjadi di berbagai negara di dunia, maka mau tidak mau Indonesia harus segera menyesuaikan diri, maka disusunlah RUU KUHAP.

Pembaruan KUHAP, selain karena penyesuaian yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan juga karena adanya gagasan dan konsep pembaruan hukum pidana materil (KUHP) sebagai konsekuensi logis dari

⁴⁶ Tim RUU KUHAP. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm. 4.

tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang tercantum dalam KUHP.

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui RUU KUHAP ini yaitu hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak- hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

(The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objective truth, the protection of the rights and freedom of man and citizen, preserves a balance between the rights of the parties, persons in similar situation and prosecuted for the same offences should bejudged according to the same rules, the maintenance of constituional system of the Republic of Indonesia against criminal encroachment, the maintanance of peace and security of mankind and the prevention of crimes).

Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warga negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, serta

bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.⁴⁷

Adapun yang menjadi landasan dibuatnya RUU KUHAP yaitu:

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

- a. KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik;

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 8

- c. Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

3. Dasar Yuridis

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).

4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Pada RUU KUHAP terdapat beberapa norma baru yang merupakan hasil adopsi dari sistem peradilan pidana negara-negara dengan sistem hukum

common law, salah satu yang menarik untuk dibahas dipenulisan ini yaitu adanya sistem jalur khusus pada pasal 199 RUU KUHAP yang mengadopsi *plea bargaining system*. Pengaturan mengenai jalur khusus dalam RUU HAP merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁸

Plea bargaining system sendiri merupakan sistem yang berlaku di proses peradilan pidana yang pada intinya mengedepankan kerjasama dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pada sistem peradilan pidana Indonesia juga terdapat beberapa mekanisme yang mengedepankan hal tersebut, meskipun tidak sama secara keseluruhan karakteristiknya, yaitu:

1. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK) yang berbunyi :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Namun dalam praktik pasal ini tidak berjalan, ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan hakim yang memutus suatu perkara, hal ini disebabkan oleh tak adanya aturan pelaksana yang

⁴⁸ Keterangan Presiden Sebagaimana dikutip oleh Marfuatul Latifah dalam *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Hlm. 3.

menjadi pedoman pasal tersebut. Selain itu, kebijakan sering disandarkan kepada pimpinan instansi penuntut umum tanpa dasar hukum yang tertulis jelas.

2. *Whistleblower*

Whistleblower termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun dalam prakteknya terkadang whistleblower juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Penjelasan lebih lanjut bahwa seorang saksi bisa dikatakan sebagai *whistleblower* harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu :

- a. *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik, sehingga diharapkan dugaan suatu kejahatan tersebut dapat diungkap dan terbongkar.
- b. *Whistleblower* merupakan orang dalam yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempat kerjanya atau ia berada, itu karena skandal kejahatan selalu terorganisasi. Dengan demikian seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

Seorang yang ditetapkan atau diputuskan sebagai *whistleblower* dan masuk dalam program *whistleblower* memiliki hak-hak yang dapat diberikan berdasarkan pasal 5 UU LPSK yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam penerapannya seorang pelapor atau *whistleblower* yang mengikuti sistem perlindungan *whistleblower* perlu menaati beberapa kriteria supaya sistem perlindungan dapat berjalan efektif, yaitu :

- a. Kesiediaan memberikan kesaksian, termasuk dalam proses peradilan;
- b. Menaati aturan terkait keselamatannya;
- c. Tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun tanpa persetujuan dari lembaga yang menangani laporan *whistleblower* selama berada dalam sistem perlindungan;

- d. Tidak memberitahukan keberadaannya selama di bawah perlindungan lembaga yang melindungi.⁴⁹

3. *Justice collaborator*

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal istilah *justice collaborator*. Pengertian dari konsep tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dimana *justice collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu disini adalah berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, kategori semua tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 juga mengatur persyaratan bagi pelaku yang bekerja sama yaitu :

- a. Harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bersifat serius yang bersifat terorganisir;

⁴⁹ Ismatul Azimah. 2016. *Studi tentang Plea Bargaining di Amerika Serikat dan Prospek Jalur Khusus dalam Pembaharuan KUHAP*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 79.

- b. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- c. Harus memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, dan pengungkapan tersebut mencakup:
 - 1) Pengungkapan tindak pidana dimaksud secara efektif;
 - 2) Mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar;
 - 3) Harus mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
 - 4) Adanya syarat jaksa penuntut umum di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan.

Selanjutnya, pengertian dari *justice collaborator* diatas memiliki keterkaitan dengan *whistleblower*, bahkan *whistleblower* bisa masuk menjadi *justice collaborator*, tetapi untuk mencari perbedaan antara *justice collaborator* dengan *whistleblower* maka mengacu pada pendapat Denny Indrayana yang mana untuk menjadi *whistleblower* maupun *justice collaborator* memiliki perbedaan yaitu pada perlindungan yang diberikan, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, *whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai

pelaku tindak pidana itu sendiri. Sedangkan pada *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Tetapi perlu diingat juga bahwa dalam prakteknya tidak jarang seorang *whistleblower* adalah salah satu tersangka dalam tindak pidana tertentu yang dilaporkan olehnya, untuk itu penyusun beranggapan bahwa *whistleblower* dapat beralih menjadi *justice collaborator* apabila terbukti bersalah dalam tindak pidana yang sama.⁵⁰

Dalam hal perlindungan yang diberikan untuk *whistleblower* maupun *justice collaborator*, pada dasarnya memiliki hak yang sama yaitu berupa:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus, yaitu berupa:
 - 1) Dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap;
 - 2) Pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan;
 - 3) Dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya;
 - 4) Memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya;

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 80

- 5) Bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukan wajahnya atau menunjukkan identitasnya;

d. Memperoleh penghargaan, yaitu berupa:

- 1) Keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan;
- 2) Memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Berikut merupakan bunyi ketentuan pasal 199 RUU KUHAP:

Bagian Keenam
Jalur Khusus
Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Secara filosofis, pengaturan mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP didasari oleh:

1. Sebagai bentuk kritik terhadap tahapan peradilan pidana sekarang yang dinilai bertele-tele. Untuk lebih menghargai adanya keinginan pelaku untuk melakukan pertaubatan, maka diaturlah mekanisme Jalur Khusus ini karena esensi proses hukum dalam pidana adalah adanya pertaubatan oleh pelaku tindak pidana. Taubat tersebut akan terlihat dalam beberapa tahap pada sistem peradilan pidana. Jadi, kesadaran atau pertobatan tersebut mungkin akan terlihat ketika tersangka diperiksa pada tahap penyidikan, pemeriksaan pengadilan, atau bahkan pada tahapan terpidana menjalani masa hukuman atau pidana. Esensinya telah disebutkan sebelumnya bahwa dikehendaki terhadap pelaku untuk menyadari dan bertobat atas perbuatannya. Dengan diaturnya mekanisme Jalur Khusus ini, maka diharapkan pertaubatan oleh pelaku semakin cepat;
2. Pengaturan mekanisme jalur khusus ini juga adalah bentuk kritik terhadap adanya tindak pidana ringan. Hukuman atas tindak pidana ringan tersebut terlampau singkat dan hanya akan menghabiskan biaya negara. Untuk menghindari hal itu, terhadap perkara-perkara ringan tersebut, maka diharapkan dengan adanya mekanisme jalur khusus ini akan mempermudah upaya penyelesaiannya melalui jalur khusus. Hal ini juga sebagai bentuk respon atas perkembangan yang terjadi khususnya dalam penyelesaian perkara di masyarakat

yang cenderung dilakukan dengan cara perdamaian dan sebagainya di luar persidangan.⁵¹

Jalur khusus dalam RUU KUHAP, memberikan peluang kepada terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk memberikan pengakuan bahwa dia telah melakukan semua perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan mengaku bersalah atasnya, namun sistem ini digunakan secara terbatas yaitu hanya dapat digunakan pada tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pengakuan terdakwa haruslah bersifat sukarela, dalam artian terdakwa tidak mengalami paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dan berdasarkan kehendak atau kesadarannya dalam memberikan pengakuan bersalahnya. Dalam jalur khusus, hakim memegang peranan penting untuk menilai kebenaran pengakuan terdakwa, apabila hakim meyakini kebenaran pengakuan terdakwa maka sidang akan dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat, namun apabila hakim tidak meyakini dan ragu akan kebenaran pengakuan terdakwa, maka persidangan akan berlanjut ke agenda pemeriksaan selanjutnya.

Jalur ini lebih memberikan keringanan secara nyata pada terdakwa dibandingkan apa yang saat ini biasa terjadi, saat ini penghargaan kepada kejujuran terdakwa biasa hanya bersifat formalitas yaitu disebut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan dalam hal yang meringankan dan biasanya akan disebut terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, selain itu akan disurutkan dengan terdakwa belum pernah

⁵¹ Rahmat Abdullah. 2015. *Politik Hukum Pidana Penerapan Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP*.

dihukum dan seterusnya, hal yang meringankan tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Hal-hal yang meringankan ini tidak dapat diketahui dengan pasti seberapa besar pengaruhnya dalam mengurangi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam jalur khusus ini jauh lebih nyata yaitu pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum ancaman.⁵²

Karena lahirnya sistem jalur khusus melalui proses adopsi dari *plea bargaining system*, maka pasti terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun yang menjadi persamaan diantara kedua sistem tersebut, yaitu:

1. Persamaan konsep *plea bargaining* yang diterapkan dalam proses beracara di Amerika Serikat dengan konsep jalur khusus dalam pasal 199 RUU KUHAP yang akan diterapkan di Indonesia adalah terdapatnya keuntungan pada kebersediaan terdakwa dalam memberikan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, jadi apabila terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka akan mendapatkan keringanan hukuman;
2. Hakim sebagai posisi yang menentukan keberhasilan proses melalui haknya dalam menerima atau menolak pengakuan bersalah dari terdakwa, jadi apabila hakim tidak puas dan tidak yakin maka

⁵² Hibnu Nugroho. *Pembaharuan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*. makalah disampaikan pada *Seminar Hukum Nasional*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto. 10 Oktober 2013. Hlm. 10

hakim berhak menolak pernyataan bersalah dari terdakwa, begitupun sebaliknya;

3. Pada penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat yaitu pengakuan bersalah yang diberikan oleh terdakwa hampir sama dengan pengakuan bersalah yang diatur dalam konsep jalur khusus yang akan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melanggar asas *non self incrimination* karena tersangka atau terdakwa mengakui secara sukarela mengenai tindak pidana yang dilakukannya;
4. Tujuan penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat dan jalur khusus dalam pasal 199 RUU KUHAP merupakan langkah agar proses peradilan pidana menjadi efektif dan efisien sehingga dapat mengimbangi banyaknya perkara pidana yang masuk di pengadilan.

Selain terdapat persamaan, terdapat perbedaan terhadap dua sistem tersebut yang penulis rangkum dalam tabel perbandingan sebagai berikut

Tabel 3:

Tabel perbandingan *plea bargaining system* (Amerika Serikat) dan jalur khusus dalam RUU KUHAP (Indonesia)

No.	Poin	<i>Plea Bargaining System</i>	Jalur Khusus
1.	Dasar Hukum	<i>Federal rules of criminal procedure rule 11</i>	Pasal 199 RUU KUHAP
2.	Pemberlakuan	Semua tindak pidana, tanpa melihat jumlah ancaman pidana	pada tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun.
3.	Bentuk	negosiasi atau mengadakan kesepakatan diluar persidangan antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan yang meringankan terdakwa.	Tidak terdapat bentuk kerjasama antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Dilakukan dengan memberikan pengakuan bersalah atas dakwaan yang didakwakan.
4.	Pembuktian	apabila pernyataan bersalah terdakwa telah diterima pengadilan, maka pengadilan dapat mengenakan sanksi tanpa melakukan pembuktian mengenai apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. ⁵³	setelah terdakwa memberikan pengakuan bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan jika hakim meyakini kebenaran tersebut, maka akan dialihkan ke acara pemeriksaan singkat dilanjutkan dengan pembuktian untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.
5.	Dasar hakim menjatuhkan putusan akhir	Dasarnya ada pada hasil kesepakatan penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukumnya.	terdapat pada pasal 199 ayat (5) RUU KUHAP, bahwa putusan tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan

⁵³ Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*. Bandung. Armico. Hlm. 34.

Jalur khusus hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun, maka selanjutnya akan penulis inventaris jenis tindak pidana apa yang dapat diterapkan jalur khusus menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RUU KUHP). Dalam RUU KUHP dilakukan pengklasifikasian bobot tindak pidana sebagai berikut:

1. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara;
2. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus;
3. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Selanjutnya mengenai pidana denda berdasarkan kategori diatur pada pasal 80 ayat (3) RUU KUHP sebagai berikut:

Pidana denda paling banyak diterapkan berdasarkan kategori, yaitu :

1. Kategori I : Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kategori II : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Kategori III : Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh jutarupiah);
4. Kategori IV : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
5. Kategori V : Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
6. Kategori VI : Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan KUHP diatas dan ketentuan jalur khusus, maka jenis tindak pidana yang dapat diterapkan sistem jalur khusus yaitu sebagaimana pada angka 1 dan 2, dengan jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Pasal 212 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

2. Pasal 221 :

Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambit lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

3. Pasal 224 :

Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan Negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

4. Pasal 271 :

Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

5. Pasal 278 :

Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

6. Pasal 283 :

Setiap orang yang menodai dengan Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, atau Lambang Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

7. Pasal 284 :

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

8. Pasal 306 ayat (1):

Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

9. Pasal 317 :

Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

10. Pasal 326 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

11. Pasal 337 ayat (1):

Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

12. Pasal 343 :

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

13. Pasal 350 :

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

14. Pasal 385 ayat (1) :

Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

15. Pasal 393 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) taun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

16. Pasal 434 ayat (1):

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

17. Pasal 469 :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

18. Pasal 492 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

19. Pasal 525 :

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda kategori IV.

20. Pasal 582 ayat (1) :

Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

21. Pasal 590 ayat (1) :

Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.

22. Pasal 595 ayat (1) :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

23. Pasal 602 :

Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

24. Pasal 628 :

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

25. Pasal 641 :

Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ismatul Azimah dalam bentuk Skripsi yang berjudul Studi tentang *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Prosen Jalur Khusus dalam Pembaharuan KUHAP mengemukakan bahwa *plea bargaining system* dapat diterapkan di Indonsia dan terdapat beberapa konsep dari *plea bargaining system* yang cocok untuk diterapkan dalam jalur khusus di Indonesia. Diantaranya yaitu melihat peranan penuntut umum yang cukup penting diantara keduanya dengan melihat pengaturan di Amerika Serikat mengenai standar penerapan diskresi penuntutan yang perlu diterapkan di Indonesia, selain itu perlu adanya standar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman meskipun terdapat pembatasan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 maksimum tindak pidana yang didakwakan, tetapi hakim juga memerlukan standar menjatuhkan putusan. Kemudian dalam *plea bargaining system* yang mengatur mengenai perlawanan hukum oleh terdakwa terhadap pengakuan bersalah dengan mengajukan mosi untuk mengadakan *new trial* dengan menyertakan alasan-

alasan berupa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional, maka perlu dalam jalur khusus perlu diatur perlawanan terhadap pengakuan bersalah.

B. Potensi Penerapan Sistem Jalur Khusus Pasal 199 RUU KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pada pembahasan kali ini, penulis akan mencoba menguraikan apa saja potensi penerapan sistem jalur khusus Pasal 199 RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan terlebih dahulu mengupas ayat perayat ketentuan pasal 199 RUU KUHAP.

Bagian Keenam Jalur Khusus Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

Pada ayat (1) diungkapkan bahwa jalur khusus akan diterapkan pada saat persidangan di pengadilan yaitu sesaat setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana terdakwa, namun jalur khusus bersifat limitatif atau terbatas yaitu hanya pada tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun atau sebagaimana tindak pidana dalam RUU KUHP yang telah dijelaskan pada halaman 92 sampai dengan 96 penulisan ini. Kemudian hakim sebagai pihak yang sentral menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan mengaku bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan ini, pengakuan terdakwa

memegang peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan sistem jalur khusus.

Sedikit melihat kebelakang dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia, pengakuan terdakwa dalam pembuktian bukanlah hal yang baru. Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, tidak juga dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. Beccaria mengemukakan bahwa: “Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi”.

Pada saat berlakunya *HIR*, pengakuan menjadi salah satu alat bukti dalam acara pidana (bahkan perdata). Pengakuan dalam pembuktian peradilan pidana dalam *HIR*, dapat diperoleh pada saat pemeriksaan dengan sistem inquisitor dan berorientasi pada praduga tak bersalah (*presumption of guilt*), yang dimana meletakkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya kedudukan terdakwa dan tidak seimbangnya kedudukan terdakwa dan penuntut umum. Servan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbauan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktik intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa merasa bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”

Seiring dengan lahirnya KUHAP yang menggantikan *HIR* didorong dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka pengakuan terdakwa tidak lagi dijadikan sebagai alat bukti. Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa: “.... seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”. Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.⁵⁴

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHAP pada pasal 184 ayat (1), yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem/teori pembuktian berdasarkan Undang-undang Negatif (*negatief wettelijke Bewijs Theorie*).

⁵⁴ Aby Maulana. 2014. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*. Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014. Hlm. 42.

Pada prinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.⁵⁵ Hal ini berdasarkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berkaitan dengan pengakuan terdakwa pada *HIR*, dengan ini sering dibandingkan dengan alat bukti keterangan terdakwa dalam KUHAP. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap

⁵⁵ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 112.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm. 112.

dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa;

4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.⁵⁷ Untuk saat ini dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.⁵⁸

Dalam memberikan keterangannya, terdakwa berhak untuk memberikan keterangannya secara bebas sebagaimana pasal 52 KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Selanjutnya alat bukti yang sah pada RUU KUHAP pasal 175 ayat (1) yaitu :

- a. Barang bukti;

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 112-113.

⁵⁸ Rusli Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm. 214.

- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan hakim.

Keterangan terdakwa dalam RUU KUHAP ketentuannya tidak jauh berbeda dengan KUHAP dan teori pembuktian tetap menggunakan teori pembuktian negatif sebagaimana pasal 174 RUU KUHAP, yang berbunyi:

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pada sistem jalur khusus, dimana ketika terdakwa memberikan pengakuan bersalahnya atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka selanjutnya hakim harus menilai apakah hakim yakin akan kebenaran pengakuan tersebut. Yang menjadi permasalahan disini menurut penulis adalah tidak adanya standar, ketentuan atau dasar hukum bagi hakim dalam menentukan keyakinannya yang dalam hal ini perkara pidana tersebut belum memasuki proses pembuktian dipersidangan yang memegang peranan penting untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak dengan minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.

Pengakuan terdakwa juga tidak dapat ditafsirkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa, karena hal tersebut sangat sempit. Lagipula keterangan terdakwa pun harus didukung oleh bukti lain yang tidak dapat digunakan secara serta merta menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

Apabila terdakwa memberikan pengakuan bersalahnya maka hakim wajib melakukan kewajiban sebagaimana ayat (3) diatas terutama yang paling menentukan yaitu pada ayat (3) huruf c yang berkaitan dengan asas *non self incrimination* dan hak asasi manusia dan kesukarelaan tersebut juga penentu hakim untuk langkah selanjutnya yaitu menilai kebenaran atau keyakinan atas pengakuan terdakwa tersebut.

- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

Pada ayat (4) dijelaskan bahwa hakim sebagai pihak yang sentral dalam proses peradilan pidana diberikan keleluasaan untuk menentukan apakah dirinya merasa bahwa pengakuan bersalah terdakwa ini benar atau tidak. Keadaan ini berkaitan dengan tim perumus lebih memilih persidangan yang terbuka, dipimpin dan diputuskan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. Pengaturan ini juga pertanda bahwa tim perumus tidak ingin RUU KUHAP sepenuhnya menjadi sistem adversarial. Tim perumus tetap mengatur salah satu karakteristik dari sistem inkuisitorial yaitu besarnya

peran hakim dalam memimpin persidangan terutama dalam proses pembuktian dan pemberian hukuman⁵⁹

Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu mengenai standar apa yang digunakan hakim untuk menilai kebenaran pengakuan bersalah terdakwa karena dalam hal memutuskan untuk menerima pengakuan tersebut tahapan persidangan belum dalam tahap pembuktian yang dimana menggunakan teori pembuktian negatif yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Selain itu pengakuan terdakwa sudah lama ditinggalkan dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan *plea bargaining system* yang dalam menentukan kebenaran pengakuan terdakwa didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan berdasarkan penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (factual basis) dalam melakukan *Plea Guilty*.

Akibat yang sangat penting akibat adanya sistem jalur khusus yang menempatkan hakim sebagai posisi yang sentral yaitu perlu adanya peningkatan kualitas hakim dalam segi pemahaman teori, praktik serta tidak kalah penting yaitu mentalitas dan spiritualitas hakim dalam menilai atau memeriksa perkara di persidangan hingga penjatuhan putusan.

⁵⁹ Choky Risda Ramadhan. Tanpa Tahun. "*Jalur Khusus*" & *Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fhui. Hlm. 5.